



Sanksi bagi Penolak Vaksin

DIY Kedepankan Persuasif



bitkan aturan sanksi bagi orang-orang yang menolak vaksinasi Covid-19.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Yaka Lena saat melakukan kunjungan ke Pemda DIY mengemukakan, seharusnya pemerintah tidak perlu memberikan sanksi berupa denda ataupun pencabutan bantuan sosial (bansos) pada masyarakat. Karena dalam kondisi seperti sekarang alangkah baiknya apabila pemerintah mengedepankan langkah persuasif dan edukasi kepada masyarakat.

Setelah metode edukasi dan persuasif tidak berjalan dengan baik maka pemerintah bisa saja memberikan sanksi. Jadi pemerintah tidak perlu buru-buru memberikan sanksi.

"Komisi IX dalam rapat bersama Menkes mendorong pemerintah untuk tidak mengedepankan pemberian sanksi, tapi mengutamakan persuasif dan edukasi.

Sehingga bisa muncul kesadaran untuk menjaga diri sendiri dan orang lain melalui vaksinasi tersebut," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu Emanuel mengungkapkan, Pemda perlu memastikan pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Tidak hanya bagi tenaga kesehatan (Nakes) tapi juga masyarakat.

*** Bersambung hal 7 kol 1**

Gubernur DIY Sultan HB X menyampaikan evaluasi pelaksanaan PPKM Mikro.

YOGYA (KR) - Pemda DIY berupaya mengedepankan langkah persuasif dan sosialisasi agar tidak muncul penolakan vaksinasi Covid-19 di kalangan masyarakat. Sampai saat ini di DIY belum ada kejadian penolakan vaksinasi.

"Sampai saat ini kami belum mendapatkan laporan adanya penolakan terkait dengan vaksin. Karena vaksinasi masih tahap tenaga kesehatan, belum ke arah publik. Semoga tidak ada peristiwa penolakan hingga seluruh tahap vaksinasi rampung diberikan kepada sasaran. Sehingga, sanksi pun tidak diperlukan. (Vaksinasi)

demikian kesehatan kita bersama," kata Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Pracimosono Kompleks Kepatihan, Senin (15/2). Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden

si-
den
(Per-
pres) No-
mor 14 Tahun
2021 mener-

"Semoga tidak ada penolakan hingga seluruh tahap vaksinasi rampung diberikan kepada sasaran. Sehingga, sanksi tidak diperlukan".

Sri Sultan HB X



DIY

Sambung dari hal 1

Dalam kesempatan itu Emanuel mengungkapkan, Pemda perlu memastikan pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Tidak hanya bagi tenaga kesehatan (Nakes) tapi juga masyarakat. Hal itu dilakukan agar penanganan pandemi di daerah bisa berjalan lancar. Selain beberapa hal tersebut, Komisi IX

juga meminta agar Pemda bisa proaktif dan memastikan insentif bagi nakes dan pembayaran klaim ke rumah sakit. Apalagi BPJS Kesehatan saat ini mengalami surplus Rp 18,7 triliun.

Sedangkan Asekda Perencanaan dan Pembangunan Setda DIY Tri Saktiyana mengakui pihaknya terus

bergerak guna melaksanakan program insentif kepada nakes maupun pembayaran klaim pasien Covid-19 kepada Rumah Sakit (RS) Rujukan di DIY hingga saat ini. Program-program kesehatan penanganan Covid-19 tersebut di DIY terus berproses menuju penyelesaian.

(Ira/Ria)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005